

Aditya Weriansyah, S.H.

Email: aditya@ijrs.or.id



Profil Singkat

Aditya Weriansyah, S.H. atau yang biasa disapa Adit merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Adit kini menjabat sebagai peneliti di IJRS. Adit memiliki ketertarikan di isu reformasi peradilan pidana. Adit sudah melakukan beberapa penelitian terkait dengan isu pidana seperti Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023, Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia, termasuk terlibat di dalam beberapa kegiatan lainnya seperti menjadi Anggota di Pokja Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika dan Pokja Konflik Kepentingan di Lingkungan Peradilan.

Jabatan Saat Ini

Peneliti

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia

Pengalaman kerja

1. Anggota di Pokja Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika (2022-sekarang)
2. Anggota di Pokja Konflik Kepentingan di Lingkungan Peradilan (2023 - sekarang)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Menjadi Project Manager di Program Penelitian Dampak KUHP terhadap Hukum Acara Pidana Tahun 2023
2. Menjadi anggota dalam Penelitian Implementasi Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia Tahun 2023

3. Menjadi anggota dalam Program Penelitian Implementasi PED 11/2021 Narkotika di Wilayah Kajari DKI Tahun 2023
4. Menjadi anggota dalam Program Dampak KUHP baru terhadap Peraturan Internal APH mengenai *Restorative Justice* Tahun 2023

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1. Menjadi anggota dalam Program Penyusunan Pedoman Pemidanaan untuk Tindak Pidana Narkotika di Mahkamah Agung RI Tahun 2022 – sekarang
2. Menjadi anggota dalam Program Monitoring dan Evaluasi Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023

Hasil Publikasi

Buku

1. Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023.
(<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/pembaruan-hukum-acara-pidana-pasca-berlakunya-kuhp-2023/>)
2. Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia.
3. (<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/pembaruan-hukum-acara-pidana-pasca-berlakunya-kuhp-2023/>)
4. Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
(<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/asesmen-penerapan-pedoman-kejaksaan-terkait-penanganan-perkara-narkotika-pedoman-11-2021-dan-pedoman-18-2021-oleh-kejaksaan-di-wilayah-hukum-kejaksaan-tinggi-dki-jakarta/>)
5. Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/asesmen-peraturan-internal-lembaga-penegak-hukum-tentang-keadilan-restoratif-terhadap-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>)
6. Mengurai Benang Kusut Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP
(<https://lbhmasyarakat.org/legal-opinion-mengurai-benang-kusut-hukum-yang-hidup-di-masyarakat-dalam-kuhp/>)